

**PENDIRIAN FASILITAS KESEHATAN DALAM PARIWISATA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN DI KOTA BENGKULU
(Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)

OLEH :

ZELVI LOVA HANDAYANI
NIM. 1416151882

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Zelvi Lova Handayani, NIM. 1416151882**
 dengan Judul: **“Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)”**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam bidang *Mumagasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 09 September 2020 M

1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, SH.M, Hum

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 196205031986031004

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iaibengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh: **ZELVI LOVA HANDAYANI, NIM: 1416151882** yang berjudul: **"PENDIRIAN FASILITAS KESEHATAN DALAM PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BENGKULU (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)"**, Program Studi Hukum Tata Negara telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari: **Rabu**

Tanggal: **30 September 2020**

Dan Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, **Januari 2020 M**

Jumadil Akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Amam Mahdi, S.H., M.H

NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Jhon Kenedi, SH,M,Hum

Wery Gusmansyah, MH

NIP. 196205031986031004

NIP. 198612062015031005

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag

Ade Kosasih, SH, MH

NIP. 19650410093031004

NIP. 198203182010011012

MOTTO

**"LIDAH ORANG YANG BERAKAL BERADA DI BELAKANG HATINYA,
SEDANGKAN ORANG YANG BODOH BERADA DI BELAKANG LIDAHNYA"**

(HR. ALI BIN ABI THALIB)

**"BERMIMPILAH DALAM HIDUP,
JANGAN HIDUP DALAM MIMPI"**

"ZELVI LOVA HANDAYANI"



PERSEMBAHAN

❖ Dengan mengharap Rahmat dan Ridho serta Puji Syukur kepada Allah SWT dan juga Doa orang-orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya persembahkan skripsi ini kepada:

❖ Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sulaidi dan Ibu Liharmi yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik secara materil maupun moril serta doa dengan penuh pengorbanan tenaga dan kasih sayang yang tak terhingga.

❖ Skripsi ini saya sembahkan untuk Almarhumah adek saya Novetri Clara Wahyuni yang selama hidupnya selalu membantu saya dengan dorongan semangat dan doa.

❖ Adek bungsu saya Rizki Nur Aziz Akmal yang selalu membantu dengan doa dan dukungan setiap waktu.

❖ Bapak/ Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu serta pengorbanan lainnya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan pelajaran serta bimbingan yang tiada ternilai harganya. Terimakasih Bapak/ Ibu dosen semoga hal ini menjadikan amal jariyah karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.

❖ Semua sahabat seperjuangan saya (Best Friends: Eko Septiawan, Rudianto, Devia Triana S,h,Novi Lestari S,h Anita Heli Halawati, Wewen Sriyani S,h, Yesi Iryani), pejuang skripsi Sherly Agustin, Ermi Susanti, Nopi Pebrianti dan semua teman satu jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Terimakasih semua atas semangat dan dukungannya yang diberikan selama ini kepada saya, terimakasih juga untuk canda, tawa, tangis yang telah kita lewati selama ini bersama-sama.

❖ Semua teman-teman kosan Pondokan Putri Sejaterah

❖ Civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

❖ Agama, Bangsa, dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyampaikan:

1. Skripsi dengan judul: **“Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)”** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2020



Zelvi Lova Handayani
NIM. 1416151882

ABSTRAK

Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kota Bengkulu. (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu)
Oleh Zelvi Lova Handayani Nim. 1416151882

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus di Pantai Panjang Kota Bengkulu). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus di Pantai Panjang Kota Bengkulu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Khususnya bagaimana peran dinas kesehatan daerah Bengkulu dalam Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam sudah cukup terlaksana meskipun belum sepenuhnya karena ada poin dalam Peraturan Daerah tersebut yang belum terwujud yaitu Pusat Kesehatan Pariwisata. Meskipun demikian, pihak Dinas Pariwisata telah mendapatkan solusi mengenai hal tersebut dengan cara berkerjasama dengan pihak Puskesmas terdekat, sehingga tidak ada kerisauan lagi mengenai ketiadaan pusat kesehatan di Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Pendirian, Fasilitas Kesehatan, Penyelenggaraan Kepariwisata

ABSTRACT

Establishment Of Medical Facilities In Tourism Based On Regional Regulation Number 6 Of 2016 Concerning The Implementation Of Tourism In The City Of Bengkulu (Case Study at Long Beach, Bengkulu City).

Oleh Zelvi Lova Handayani Nim. 1416151882

The problems studied in this thesis are How Establishment Of Health Facilities In Tourism Based On Regional Regulation Number 6 Of 2016 Concerning The Implementation Of Tourism In The City Of Bengkulu (Case Study at Long Beach, Bengkulu City). The purpose of this study is to determine the Establishment Of Health Facilities In Tourism Based On Regional Regulation Number 6 Of 2016 Concerning The Implementation Of Tourism In The City Of Bengkulu (Case Study at Pantai Panjang, Bengkulu City). The method used in this research is field research (Field Research) using qualitative descriptive methods with data collection tools through interviews. This study uses a juridical-sociological (field) approach or an empirical approach which is a research approach where the researcher must face the community who is the object of research so that many unwritten rules apply in society. In particular, what is the role of the Bengkulu regional health office in the Implementation of Tourism in Bengkulu City. From the results of the study it is concluded that the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Tourism in Bengkulu City in the Perspective of Islamic Law has been sufficiently implemented even though it has not been fully implemented because there are points in the Regional Regulation that have not been realized, namely the Tourism Health Center. Even so, the Tourism Office has found a solution regarding this matter by cooperating with the nearest Puskesmas, so that there is no more concern about the absence of a health center in Pantai Panjang Tourism, Bengkulu City.

keywords: Establishment, Medical Facilities, Tourism Administration

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Senantiasa memberikan Rahmat-Nya dan mengizinkan saya menyelesaikan Skripsi saya yang berjudul “Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Pantai Panjang Kota Bengkulu).” Dan tak lupa pula shalawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW .

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin, M. M. Ag., M. H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, M. H, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Bapak Ade Kosasih, S. H.,M. H, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH.M, Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Wery Gusmansyah, MH Pembimbing II, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua Orangtua yang sangat berperan dalam membantu mendoakan kesuksesan penulis.

6. Kepada Bapak/ Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dan mengajari banyak hal.
7. Pustaka dan semua pihak yang telah membantu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamuallaikum, Wr. Wb.

Bengkulu, September 2020

Zelvi Lova Handayani
NIM. 1416151882

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tinjauan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
1) Kegunaan teoritis/ akademis	11
2) Kegunaan Secara Praktis.....	12
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	15
1) Jenis dan pendekatan penelitian.....	15
2) Waktu dan lokasi Penelitian	15
3) Subjek/ Informan penelitian.....	16
4) Sumber data	16
5) Teknik Pengumpulan Data.....	17
6) Teknik Analisa Data	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian Pariwisata	20
B. Pengertian Pariwisata dalam Al-Qur'an dan Sunnah.....	24
C. Implementasi	26
D. Kepariwisataaan	28

E. Peran Pariwisata dalam Pembangunan	30
F. Hukum Islam.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Kota Bengkulu	38
B. Kesehatan Pariwisata	42
C. Pemerintah Kota Bengkulu	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa.....	46
B. Faktor Penyebab Tidak Adanya Pusat Kesehatan Pariwisata	50
C. Perkembangan Pariwisata	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	65
B. Jurnal dan Skripsi.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Indonesia, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peran yang penting di dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini tambah lagi diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu dari tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.¹

Negara Indonesia merupakan negara Kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dan terletak di garis Khatulistiwa, yang membuat negara Indonesia memiliki keindahan dan daya tarik tersendiri serta kekayaan Flora, Fauna serta beraneka ragam budaya yang dapat dijadikan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Ketut suwena, Gusti ngurah w, *pengetahuan dasar ilmu pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h.10

Sehingga Negara Indonesia memiliki banyak daerah atau tempat untuk berwisata, wisata adalah berpergian yang dilakukan bersama-sama dengan orang terdekat pada akhir pekan ataupun disaat hari libur. Tujuannya untuk berlibur dan mendapatkan hal-hal baru, bersenang-senang serta menambah pengetahuan.

Wisata sangat di anjurkan kepada setiap orang untuk membuat pikiran dan badan menjadi sehat, namun harus menjaga kebersihan diri agar terhindar dari hal yang tidak baik, baik itu menjaga kesehatan tubuh maupun lingkungan sekitar terutama lingkungan pariwisata yang banyak di kunjungi oleh setiap orang. Untuk mengembangkan potensi pada kawasan wisata di Kota Bengkulu, sangat di perlukan strategi yang tersusun agar bertambahnya wisatawan yang menikmatinya.² Selain memperhatikan potensi wisatanya, haruslah ada perhatian terhadap pembuatan posko kesehatan di setiap kawasan wisata yang ada di Kota Bengkulu untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang datang.

Hadis yang mengharuskan setiap orang menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar adalah. Seperti yang ada pada:

“Agama islam itu adalah (agama) yang bersik/ suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang agama suci.” (HR. Baihaqi)

Ada pula ayat yang bersangkutan seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut :

² Budiman Sakti, Handika Fikri P, “*Trategi Pengembangan Pantai Panjang Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Wisatawan dan Masyarakat Lokal*”, Vol 01 No. 1, h. 3

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa Demi penjagaan terhadap kesehatan, syariat Islam juga memberikan berbagai keringanan di dalam beribadah dengan tujuan meringankan, memudahkan dan tidak membuat payah badan dan bisa di kaitkan dengan pemeliharaan kesehatan di kawasan kepariwisataan karena jika seseorang menggunakan harta benda contohnya Uangnya untuk membeli Sesutu yang tidak baik dan berada di dalam kawasan pariwisata maka bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan untuk orang yg berada di sekitar lingkungan dan jika hal itu terjadi dan tidak ada pusat pelayanan kesehatan bisa saja akan terjadi hal yang buruk terhadap seseorang.

Jika masyarakat telah sadar untuk tidak merusak dan menyalagunakan fasilitas yang telah ada maka usaha dalam memanfaatkan dan mengola potensi alam yang dimiliki secara efektif dan efisien guna

mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya³ akan terwujud sesuai yang diharapkan.

Generasi manusia tidaklah terpotong dari pohon kemanusiaan, dan setiap generasi terikat dengan hukum-hukum yang berlaku atasnya. Hukuman yang menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa terdahulu juga akan menimpa orang-orang yang jahat dan berdosa setelah mereka. Karena, hukum-hukum itu tidak akan menyimpang dan tidak pandang bulu. Berwisata dimuka bumi akan menampakkan kepada jiwa manusia tentang perumpamaan, sejarah, dan kondisi yang mengandung pelajaran.⁴

Selain untuk menikmati ciptaan Allah SWT, wisata juga dapat membantu pemasukan daerah karena dari Kepariwisataan akan menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara dan melalui kepariwisataan daerah dapat mendorong Pemerataan pembangunan serta kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2016 Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah.

Sektor Pariwisata adalah salah satu pembangunan yang mempunyai manfaat ganda atau *multiplier effects* secara ekonomi bagi pemerintah daerah

³ Harsoyo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Persada, 1977), h. 121

⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan⁵.

Pembangunan Kepariwisata memiliki beragam manfaat dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. Secara ekonomi investasi kegiatan pembangunan kepariwisataan akan lebih cepat mempercepat sirkulasi ekonomi suatu negara atau daerah karena bermanfaat ganda dari adanya kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik yang dapat menciptakan pendapatan dalam perekonomian termasuk membantu pelaksanaan pembangunan pada daerah terpencil yang memiliki daya tarik wisata.

Pembangunan sektor pariwisata menjadi perhatian dalam pembangunan diprovinsi Bengkulu. Hal tersebut tercermin dari kebijakan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan objek wisata yang ada di daerah. Dalam memperkenalkan dan menggalakkan wisata, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti promosi wisata, pembangunan sarana dan prasarana menuju tempat wisata, dan penyediaan akomodasi yang memadai berupa hotel dan akomodasi lainnya. Seiring dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, masih terdapat beberapa kendala terkait pengembangan sektor pariwisata di provinsi Bengkulu.⁶

Yang menjadi kendala bagi pembangunan pariwisata di Kota Bengkulu seperti Belum tersedianya fasilitas yang memadai yang

⁵Barika, "Kajian Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Bengkulu (studi kasus pengembangan kawasan wisata pantai panjang dan tapak padri)", Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009), h.1

⁶Suwarni, Ahmad Soleh, "Membangun Bengkulu Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata", *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, Tahun 2014, h.826.

mendukung tercapainya pusat pariwisata yang sesuai dengan standar yang di tentukan, karena dipusat pariwisata masih sangat kurang fasilitas kesehatan seperti yang terlihat tidak adanya posko pelayanan kesehatan yang ada di sekitar pusat pariwisata tersebut. Padahal adanya posko pelayanan kesehatan sangat la diperlukan dipusat pariwisata yang bersifat umum dan banyak di datangi orang, guna memberikan pelayanan pertama jika terjadinya hal yang tidak baik seperti kecelakaan atau sakit mendadak ketika berada di tempat pariwisata.⁷

Di Kota Bengkulu banyak tempat-tempat wisata yang dapat di bangun oleh pemerintah Daerah salah satunya kawasan wisata pantai panjang, pantai yang memiliki panjang kurang lebih 7 km memiliki daya tarik yang baik untuk menarik wisatawan asing maupun domestik, namun untuk posko pelayanan kesehatan sama sekali tidak ada seperti tenda darurat atau pun bangunan permanen yang memang difungsikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang berada dikawasan pariwisata tersebut.

Hal ini dapat kita lihat dari bangunan yang terlihat di sepanjang area kawasan pariwisata seperti pantai panjang yang banyak digunakan anak-anak untuk bermain namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan tidak ada posko pelayanan kesehatan untuk penanganan kecelakaan ringan atau penanganan pertama jika terjadi hal yang diluar dugaan. sehingga hal tersebut

⁷Suwarni, Ahmad Soleh, "Membangun Bengkulu Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata", *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, Tahun 2014, h.826.

meresahkan dan membuat tidak nyaman baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan yang datang.

Padahal posko pelayanan kesehatan tersebut dapat menunjang lajunya kegiatan pariwisata. Hal ini berarti, kawasan wisata itu harus ditata dengan prinsip islami dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan agar berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Dengan dilakukannya pendirian posko pelayanan kesehatan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.⁸ Seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah terdapat dalam BAB IV USAHA PARIWISATA Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

Usaha Pariwisata meliputi antara lain:

- f. Penyediaan akomodasi yang terdiri dari;
 - 1) Sarana dan prasarana olahraga
 - 2) Pusat kesehatan
 - 3) Perhotelan dan penginapan

Peraturan Daerah tersebut sudah jelas mengatakan bahwa pusat kesehatan dalam pariwisata harus menyediakan akomodasi berupa pusat kesehatan. Oleh karenanya baik dalam ilmu islam maupun umum penataan kawasan wisata perlu mendapat perhatian agar terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan *tabdzir/israf* dan kemunkaran, seharusnya

⁸Agus Budi Wibowo dan Muzakkir Ismail, *Dunia Periwisata di Aceh*, (Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan provinsi NAD, 2008), h. 128

menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah BAB II ASAS, FUNGSI, dan TUJUAN Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan.”

Namun hal itu belum diterapkan di kawasan pariwisata Kota Bengkulu dikarenakan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan wisata Kota Bengkulu tidak merata, seperti kurangnya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan wisatawan dan diharapkan seperti, toilet, bangunan-bangunan tempat istirahat wisatawan, jogging track, musholah, taman bermain anak-anak, khususnya posko pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Hak menguasai negara tidak dapat terpisahkan dari tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga negara apabila tidak dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara tidak memiliki hak untuk menguasai negara, hak menguasai dari negara menentukan negaralah yang mengatur kebijakan nasional melalui pendistribusian objek agraria.⁹

⁹ JT Pareke, “ Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan”, *Al-Imarah*, Vol. 2, No 1, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 2017, h.68

Banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi terutama jika tidak di dukung oleh masyarakat sekitar tempat pariwisata tersebut. Disinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan disektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan satu strategi yang dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Dalam memajukan sector pariwisata di tingkat daerah peran pemerintah sebagai motor penggerak dan selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada dinas kebudayaan dan pariwisata daerah dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.¹⁰

Inovasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di daerah. Oleh karena itu daerah perlu menyusun visi, misi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar pengembangan pariwisata daerah semakin terarah sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah.¹¹

¹⁰ Agus Bahrudin, "Inovasi Sektor Pariwisata Daerah", *Primadany*, Vol. 1, No 1, Jurnal Mimbar Administrasi, Oktober, 2017, h.51

¹¹ Sefira Ryalita Primadani, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah kabupaten nganjuk)" *Primadany*, Vol.1, No 4, Jurnal Administasi publik, 2017, hal.136

Sama halnya dengan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada pertengahan bulan april lalu, penyampaian dari salah satu Narasumber peneliti yang bernama Hendra sebagai salah satu pengawas Pariwisata Pantai Panjang, ia mengatakan “kalo posko kesehatan di sekitar kawasan pantan panjang ini memang tidak ada, saya juga tidak mengetahui alasan atas ketidakadaan posko/ pusat kesehatan tersebut tapi di daerah kawasan pantai panjang ini ada pos polisi untuk pengamanan, mushola untuk ibadah dan toilet umum juga ada.”

Pariwisata sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang murni berada pada ranah ekonomi. Masalah-masalah sosial, budaya dan perlindungan lingkungan hidup, juga menjadi bagian dari kepariwisataan karena pada intinya aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan kebudayaan yang (mungkin sangat) berbeda dan mereka mengkonsumsi sumber daya (tak terbarukan) di destinasi pariwisata. Bukan hanya itu saja, namun dapat dikatakan sektor pariwisata menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat, dengan potensi persoalannya masing-masing. Oleh karena itu, sangat tepat ilustrasi yang diungkapkan sebagai berikut: *“Tourism is like fire. It can cook your food or burn your house down”*

Oleh sebab itu dapat dikatakan hal tersebut belum terpenuhi oleh pemerintah daerah kota Bengkulu dan belum dapat tindakan dari Dinas Kesehatan terhadap perhatian untuk membentuk posko kesehatan, masih banyak juga masalah-masalah dalam pembangunan kawasan pariwisata

khususnya untuk membentuk posko kesehatan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan Pariwisata kota Bengkulu sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pantai Panjang Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pantai Panjang Kota Bengkulu)?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kota Bengkulu (Studi Kasus Pantai Panjang Kota Bengkulu).

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis/ Akademis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

3) Kegunaan teoritis/ akademis adalah sebagai berikut:

- a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas bagaimana Peran Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Kepariwisata tertuma di kawasan wisata di Kota Bengkulu serta untuk mengetahui tentang bagaiman penyelenggaraan kepariwisataan menurut Hukum Islam.

4) Kegunaan Secara Praktis adalah sebagai berikut:

Diharapkan dapat memberikan kontribusi secara manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Bengkulu dan Penyelenggaraan Kepariwisata di tinjau dari hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang kawasan wisata serta objek wisata. Untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Skripsi oleh Melda Yuli Haryani yang berjudul “ Strategi Pengembangan Jasa Pariwisata Kota Bengkulu”¹² dengan penelitian yang ingin saya lakukan memiliki persamaan yaitu membahas tentang Pariwisata di Kota Bengkulu, dan memiliki perbedaan sebagai berikut : Jika Skripsi Melda Yuli Haryani lebih menekankan pada Strategi-strategi pengembangan jasa pariwisata apa saja yang perlu di perhatikan dan di pertimbangkan oleh pemerintah yang diambil berdasarkan harapan wisatawan, pengambil keputusan, pelaku usaha dan masyarakat di sekitar Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), sedangkan penelitian yang ingin saya teliti lebih kepada bagaimana peran Dinas kesehatan di kota Bengkulu dalam pembangunan kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 06 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Fahadil Amin Al Hahasan dengan judul “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia” melihat kondisi pada saat ini tidak adanya peraturan mengenai pariwisata halal dan juga atas permintaan beberapa pihak, maka

¹²Melda Yuli Haryani, “Strategi Pengembangan Jasa Pariwisata Kota Bengkulu”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, 2007), h. 1.

pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah (halal) yang dapat di gunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiantan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengunjungnya.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh Zarina yang berjudul “ Penataan Kawasan Wisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islami (studi deskriptif analitis tempat wisata pantai kuthang gampong sagoe kecamatan trienggadeng kabupaten Pidie 2016 memiliki persamaan dengan penelitian yang ingin saya lakukan seperti sama-sama ingin meneliti kawasan wisata menurut prinsip islam. Skripsi saya dan Zarina memiliki perbedaan jika skripsi Zarina berfokus pada penataan kawasan wisata berdasarkan prinsip-prinsip islam, sedangkan yang ingin saya teliti adalah penyelenggaraan kepariwisataan menurut hukum islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Intan permatasari yang berjudul “Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata kasus pulau kapota, wakatobi sulawesi tenggara. memiliki kesamaan dengan yang saya

¹³ Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Al-Ahkam*, Vol. 2, No 1, jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Juni, 2017, hal.61

lakukan seperti sama meneliti tentang pengembangan pariwisata. Skripsi saya dan Intan Permata Sari memiliki perbedaan jika skripsi Intan Permata Sari lebih fokus dengan siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan pariwisata, maka saya ingin lebih fokus tentang peran dinas kesehatan yang ada di pariwisata untuk menunjang pengembangan pariwisata agar terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung.

5. Deddy Prasetya Maha Rani dengan judul “Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus : Pantai Lombang)”, Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dengan bidang tersebut, industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintahan maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian untuk berpariwisata.¹⁴
6. Jurnal dengan Judul “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo” oleh Choridotul Bahiyah, Wahyu Hidayat, Sudarti. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang serius digarap oleh negara-negara dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang

¹⁴ Deddy Prasetya Maha Rani, “Pengembangan Potensi Pariwisata”. *Al-Ahkam*, Vol.3, No. 3, Jurnal Politik Muda, Agustus, 2014, h.143

besar karena Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang luas, yang wilayahnya membentang dari Sumatera sampai Papua. Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, sehingga keadaan ini menjadi sebuah perhatian yang besar dari para ahli dan perencana pembangunan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat¹⁵. Khususnya bagaimana peran dinas kesehatan daerah Bengkulu dalam Penyelenggaraan Kepariwisata di Kota Bengkulu.

2) Waktu dan lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019/2020. Penelitian ini akan menggunakan waktu satu bulan yaitu dari awal bulan Desember hingga akhir bulan Januari. Penelitian ini akan bertempat di Kota Bengkulu dikarenakan

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

peneliti bertempat tinggal di Kota Bengkulu sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti.

3) Subjek/ Informan penelitian

Peneliti akan melibatkan informan yang dianggap tau mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek atau informan penelitian seperti Pemerintah Daerah Kota Bengkulu terkhusus Dinas kesehatan Kota Bengkulu. Dinas Kepariwisata Kota Bengkulu, dan masyarakat Kota Bengkulu.

4) Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data Primer dan data Sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan¹⁶. Data itu diperoleh melalui wawancara dari pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kesehatan di kawasan wisata seperti Dinas kesehatan dan PMI Kota Bengkulu yang dapat membatu mewujudkan adanya Penyelenggaraan Kepariwisata daerah Kota Bengkulu yang aman dan nyaman bagi masyarakat, dinas-dinas terkait seperti Dinas kesehatan kota Bengkulu

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31

dan Pmi Kota Bengkulu, serta wisatawan dan masyarakat disekitar kawasan wisata. Data Sekunder

- b. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber-sumber data sekunder baik berupa Buku, Jurnal, dan sumber hukum tertulis lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu produk bersama (*Joint Product*) tentang apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain¹⁷. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Kota Bengkulu, di sini penulis menggunakan *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

¹⁷Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 120.

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/ situasi Sosial yang diteliti¹⁸

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*Semi Structured Interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview's Guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden tanpa mengganggu orang yang diwawancarai.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data¹⁹. Dalam penelitian Kualitatif, teknik Observasi digunakan bersamaan dengan teknik wawancara mendalam (*Deep Interview*).²⁰

c. Analisa Dokumen

Analisa dokumen adalah cara pengumpulan data dari berbagai dokumen untuk dapat digunakan sebagai informasi tambahan data penelitian.

6) Teknik Analisa Data

a. Pengelolaan Data

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rdan D*, (Bandung : Alfabeta, CV, 2013), h. 218-219.

¹⁹Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Depok, Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 161.

²⁰Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 163.

Pengelolaan data adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung lapangan dan literatur-literatur yang ada, lalu diolah melalui proses *Editing*. *Editing* maksudnya adalah memilih dan mengumpulkan data lalu diubah menjadi kalimat-kalimat yang dapat dikonsumsi banyak orang.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, karena tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

Analisa data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun lapangan hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data)²¹. Peneliti kualitatif menggunakan analisis deduktif, yang berarti kategori, tema, dan pola yang berasal dari data²². Dari analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan penelitian.

²¹Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 229

²²Ruslam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 230

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pariwisata

Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sanskerta.²³

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang dalam

²³ Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h. 15

bahasa Inggris disebutkan *tourism*. Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan, berpedoman pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
5. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

6. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/ jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang-orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan strategi pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh dalam suatu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.²⁴

Bisnis pariwisata dianggap lahir pada tahun 1962 ketika Hotel Indonesia diresmikan dan hukum tentang kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut

²⁴ Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar ...*, h. 18

pada dasarnya bertujuan seperti diatur alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang secara tegas menyatakan tujuan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keistimewaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Keistimewaan yang lain yaitu dengan dimasukkannya unsur penting yang kini tengah menjadi isu dunia pada umumnya. Hal tersebut terkait kepariwisataan yang merupakan bagian pembangunan nasional yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dua istilah penting berkelanjutan dan bertanggung jawab belum ada pada pengaturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Ketentuan lain yang merupakan suatu perubahan besar dalam kepariwisataan adalah dicantumkannya Badan Promosi Pariwisata. Dalam Bab X mengamanatkan pembentukan suatu Badan Promosi Pariwisata. Salah satu dari Badan Promosi yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2009 adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan ini dibentuk karena muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan, yang tugasnya

mengembangkan program/kegiatan pemasaran dan promosi secara profesional.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka keberadaan Badan Promosi Pariwisata (baik di tingkat pusat maupun daerah) telah memiliki payung hukum bagi pembentukannya. Badan Promosi Pariwisata diatur secara khusus dalam Bab X Undang-Undang tersebut, dan khusus untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Pasal 43 – 49. Sesuai Undang-Undang tersebut, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.²⁵

B. Pengertian Pariwisata dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya penulis temukan tujuh bentuk redaksi kalimat, diantaranya adalah :

1. **“Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaran”** : (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil. Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An'am (6) : 11, Qs. Annamal (27) : 69, Qs. al-Ankabut (29) : 20, Qs. al-Rum (30) : 42, Qs. Saba' (34) : 18 dan

²⁵ Ketut Bagiastuti, *“Implementasi Undang-Undang Kepariwisata dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali”*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 3 No. 2, Juli 2013

28, Qs. al-Mukmin” (40) : 21, Qs. Fathir (35) : 35, dan Qs. al-Nahl (16) : 36.²⁶ Pada surat-surat di atas dijelaskan dengan beragam redaksi, anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata kerja sedang berlansung dan kata perintah, sehingga di dapat motivasi para Rasul dan Nabi terdahulu dalam melakukan perjalanan.

2. **“Al-Safar”** : (Perjalanan) terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 184,185,283, Qs. An-nisa’(4) : 43, Qs. al-Maidah (5) : 6.²⁷ Dalam beberapa surat dan ayat di atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama’ dan mengqasar sholat begitu juga di bolehkan berbuka bagi yang berpuasa.
3. **“Rihlah”** : (Perjalanan) terdapat dalam Qs. Qurays (106): 1-4.²⁸ Menerangkan Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan/wista rohani ke tiga Masjid, sebagaimana dalam sabda Beliau :

“Tidaklah kamu dianjurkan melakukan perjalanan melainkan kepada tiga masjid diantaranya Al-Masjid Al- Haram, Masjid Al-Rasul, Masjid Al-Aqsa”²⁹

²⁶ Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 1989 M), h 105.

²⁷ Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu’jam al-Quran ...*, h 112.

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu’jam al-Mufahris Li-Alfaz al-Quran*, (Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M), h 96.

²⁹ Imam Bukhari dalam *Sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah*, jilid 4, h. 491, h. 1189 dan Imam Muslim dalam *Sahehnya bab La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa*, Jilid 4, h. 126, h. 3450

4. **“Hajara-Yuhajiru-Muhajiran”** : (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Qs. Annisa’ (4) : 100. Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.

C. Implementasi

1. Definisi Implementasi

Secara umum Implementasi berarti Penerapan atau pelaksanaan, Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Jadi jika implementasi sebuah peraturan, maka itu artinya sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Ada juga definisi dari beberapa ahli, diantaranya:

1. Wheelen D Hunger

Pengertian implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi.

2. Van Meter dan Van Horn

Menurut ia implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan

untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

3. Mazmanian dan Sabatier

implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

4. Prana Wastra, dkk

Sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi itu suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

2. Tujuan Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

D. Kepariwisataan

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Dalam kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang – orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. Berbagai – macam pendapat para ahli mengenai pariwisata diantaranya :

a. Menurut Richard Sihite

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan

tempatnyanya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata – mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan beraneka ragam.

b. Menurut Kodhyat

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

c. Menurut James J Spillane

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan.

Kota Bengkulu mempunyai potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, salah satunya adalah Pantai Panjang yang terletak di sisi barat Kota Bengkulu yang jaraknya dari pusat kota hanya lebih kurang 2 kilo meter. Letak yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota merupakan kekuatan yang dimiliki selain indahnya panorama alam dan laut sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Propinsi dan Kota Bengkulu untuk menjadikan Pantai Panjang sebagai kawasan wisata yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Bengkulu. Ada enam fokus bentuk wisata yang akan dikembangkan di kawasan Pantai Panjang yaitu: wisata pantai, wisata urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan

wisata pelabuhan. Pengembangan wisata kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bengkulu memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata. Hal ini dapat dilihat data dari Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu mengenai data kunjungan wisman dan wisnus tahun 2007-2014 yang menunjukkan ada kenaikan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya rerata sebesar 19,71 persen, memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bengkulu terhadap data jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

E. Peran Pariwisata dalam Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, Indonesia memiliki banyak peluang dan tantangan yang kalau dilihat sebagai suatu totalitas memiliki banyak peluang dan tantangan yang kalau dilihat sebagai suatu totalitas memiliki posisi yang semakin kuat karena ada diferensiasi produk wisata yang cukup beragam. Namun dari 25 daerah tujuan wisata yang terbanyak dikunjungi ada di Indonesia, konsentrasi pembangunan kepariwisataan hanya terjadi di beberapa daerah tujuan wisata saja seperti Bali, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Pemerintah memberi dukungan dalam pembinaan dan pengelolaan kepariwisataan daerah berupa memberikan otonomi daerah, meskipun pada kenyataannya kinerja pembinaan dan pengelolaan belum terwujud secara optimal.³⁰

Disamping itu, terdapat strategi pembangunan kepariwisataan Indonesia yang membagi Indonesia menjadi 2 kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bappenas. Adapun alasan utama pembagian tersebut adalah agar dapat menciptakan produk wisata secara utuh, memiliki nilai dan berdaya saing tinggi. Pada dasarnya sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup besar kontribusinya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah. Hal tersebut menjadikan pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah.

Namun agar potensi dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, serta masyarakat. Diperlukan mensosialisasikan RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional) sekaligus menginventarisir problem di masing-masing daerah dan mencari solusi agar

³⁰ Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah ...*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 72

tercipta wisata yang kondusif. Kunci pengembangan pariwisata ada pada Pemerintah Daerah.

Pariwisata juga dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya , untuk Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya sarana dan prasarana demi pengembangan pariwisata.

Bisa juga dikatakan pariwisata merupakan sebuah sistem yang besar karena memiliki suatu aktifitas yang kompleks. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti terdapat analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan.³¹ Maka dari situlah dapat dikatakan bahwa pariwisata berdampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi pada suatu daerah.

Adapun prioritas utama pada pariwisata dalam peran pembangunan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Penataan kuliner
2. Penataan keindahan
3. Penataan kaki lima
4. Penataan perhotelan
5. Penataan keamanan kawasan wisata

³¹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 29

6. Penataan posko kesehatan³²

Dari penjelasan diatas, jika semua hal tersebut diprioritaskan maka akan terciptalah tempat wisata yang nyaman dan aman. Apalagi yang harus diutamakan itu bagian keamanan dan kesehatan, karena dua hal tersebut yang menjadi faktor penentu pada setiap tempat wisata. Pariwisata yang tidak sehat akan memberikan dampak terhadap industri pariwisata dan masyarakat penikmatnya. Sebaliknya, pariwisata yang sehat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk lebih mempromosikan pariwisata di daerah tersebut untuk meaikan pembangunan dalam bidang perekonomian daerah tersebut.³³

Pariwisata di Indonesia sangat berpeluang untuk dikembangkan meskipun ditemui berbagai masalah mendasar yang perlu ditangani. Berkaitan dengan masih kurangnya kinerja dan posisi kepariwisataan, pendidikan pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti berupa sumbangan-sumbangan pemikiran maupun tindakan nyata yang dibutuhkan untuk pengembangan di bidang kepariwisataan, khususnya dalam penyediaan sumber daya manusia kepariwisataan yang berkualitas.

³² Budiman Sakti, Handika Fikri P, "*Trategi Pengembangan Pantai Panjang Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Wisatawan dan Masyarakat Lokal*", Vol 01 No. 1, h. 175

³³ Adi Wirawan, "*Kesehatan Pariwisata:Aspek Kesehatan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata*". Vol. 03 NO. 01, h. 10

F. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku muallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, mengikat bagi semua pemeluknya.³⁴

Aturan wisata dalam ajaran islam yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat.³⁵

Wisata sangat di ajurkan kepada setiap orang untuk membuat pikiran dan badan menjadi sehat, namun harus menjaga kebersihan diri agar terhindar dari hal yang tidak baik, baik itu menjaga kesehatan tubuh maupun lingkungan sekitar terutama lingkungan pariwisata yang banyak di kunjungi oleh setiap orang. Produk wisata dalam Islam dapat mencangkup kunjungan aktivitas seperti: Shopping, Traveling, Taman Hiburan, Kota-Kota yang sangat padat, Warisan Budaya Islami, Hutan hujan atau ekowisata lainnya.

Maka dari itu haruslah ada perhatian pada setiap hal-hal yang ada dalam kepariwsaan tersebut, yang utamanya adalah keamanan dan kesehatan. Pada dasarnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita saat bergerombol menikmati destinasi wisata yang dikunjungi. Oleh sebab itu

³⁴Permatasari, Intan, "Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata ", *Madania*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, h.31

³⁵Shalih Al-Munajjid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA, 2013), h. 5-6.

Pemerintah Harus dapat mengantisipasi seperti menyediakan keamanan wisata dan posko kesehatan agar tidak ada hal buruk yang terjadi.

Pada dasarnya pusat kesehatan di pariwisata tidaklah harus berupa gedung yang dibangun sedemikian rupa, melainkan cukup dengan seperti tenda besar dengan fasilitas yang lengkap sebagai persiapan bencana yang tidak dapat kita prediksi oleh manusia. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya sebuah persiapan, akan tetapi hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, yang pada dasarnya banyak hal yang harus dipersiapkan diantaranya: izin mendirikan, peralatan kesehatan, penjaga posko yang bisa siaga, dan masih banyak hal lainnya. Selain itu, para wisatawan haruslah menjaga kesehatan diri mereka juga sebelum berpergian ke destinasi wisata yang ada di Kota Bengkulu, agar dapat menikmati waktu berwisata dengan nikmat dan tidak ada masalah yang dirasakan.

Ada pula ayat yang mengharuskan setiap orang menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar adalah. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Pada ayat diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan harta bendamu pada hal yang kebaikan bukan pada kesesatan. Dalam pandangan umumnya, setiap daerah memiliki pendanaan dari pemerintah daerah untuk pengembangan pembangunan sektor kepariwisataan agar tempat wisata tersebut banyak diminati oleh masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Akan tetapi ada saja poin yang dilupakan yaitu salah satunya pembanguna kesehatan di destinasi wisata. Padahal hal tersebut sangat penting dalam hal kepariwisataan. Kita tidak dapat mengetahui hal buruk apa yang akan terjadi, oleh sebab itu tidak ada salahnya jika mengantisipasi dengan menyiapkan tempat kesehatan atau posko kesehatan demi menghindari dan mencegah hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi.

Di dalam Islam ada juga istilah Pariwisata Syariah, yang merupakan pariwisata mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religius, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, melainkan adab perjalanan dan fasilitas lainnya.

Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah islam. Objek wisata syariah berlaku untuk semua tempat wisata, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna bahwa masyarakat muslim harus ber-

Islam dimanapun dan kapan pun. Pemaknaan yang kurang tepat terkait pariwisata syariah disebabkan karena edukasi yang kurang. Dari sudut pandang wisatawan, ketersediaan informasi yang kurang adalah penyebab utama ketidakpahaman tentang pariwisata syariah. Dari sudut pandang pelaku bisnis, pariwisata syariah belum dikenal karena belum adanya panduan-panduan jelas terkait pariwisata syariah. Pemerintah daerah pun belum berani mengembangkan pariwisata syariah karena belum ada panduan dan arah yang jelas dari pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata syariah walaupun pemerintah daerah sudah paham secara umum terkait pariwisata syariah.³⁶ Jadi dari hal itu baik itu dalam pandangan islam/ syariah maupun umum, pariwisata sudah jelas diperbolehkan dan sudah ada banyak ragam destinasinya. Jadi harus dijaga bersama baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, haruslah ada kerjasama yang saling menguntungkan dan menciptakan kedamaian baik bagi individu maupun sosial.

³⁶ Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah ...*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 94

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kota Bengkulu

1. Geografi

Kota Bengkulu terletak di tepi Pantai Samudra Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera) diantara 1020° 14 " - 1020° 22" Bijur Timur dan 30° 45" - 30° 59" Lintang Selatan dengan luas wilayah lautan 387,6 Km². Kota Bengkulu secara administrasi berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Seluma
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Kota Bengkulu terletak diketinggian 0 – 16 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi 70 % datar dan 30 % berbukit dan rawa-rawa dengan suhu udara normal.

Tabel 1. Luas Kota Bengkulu menurut Kecamatan tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Daratan (KM²)	Jumlah Kelurahan
1.	Gading Cempaka	14,42	5
2.	Singaran Pati	14,44	6

3.	Ratu Agung	11,02	8
4.	Ratu Samban	2,84	9
5.	Teluk Segara	2,76	13
6.	Sungai Serut	13,53	7
7.	Muara Bangkahulu	23,18	7
8.	Selebar	46,36	6
9.	Kampung Melayu	23,14	6
	Jumlah	151,7	67

Sumber : BPS Menurut Bakorsurtanal

2. Kependudukan

a. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah penduduk Kota Bengkulu tahun 2016 berjumlah 359.488 jiwa terdiri dari Penduduk laki-laki berjumlah 180,289 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 179,199 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 menurut BPS (diolah oleh Pusdatin RI) sebesar 2,33% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,16.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup.

Distribusi penduduk Kota Bengkulu tahun 2016 berdasarkan proyeksi tim profil dinas kesehatan Kota Bengkulu menurut kelompok umur adalah berusia muda (0-14 Tahun) berjumlah 105.923 jiwa (29,46%), Usia produktif (15-59) berjumlah 236.496 Jiwa (65,79%) dan yang berusia 60 tahun keatas berjumlah 17.069 jiwa (4,75%). Angka beban tanggungan adalah 48,51%.

b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin berguna untuk melihat suatu perbandingan antar penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang merupakan salah satu indikator keseimbangan gender dalam kuantitas, rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Secara umum di Kota Bengkulu tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin (Sex Ratio) sebesar 100,61 yaitu diantara 101 Penduduk laki-laki ada 100 Penduduk perempuan.

c. Tingkat Pendidikan Penduduk

Kondisi tingkat pendidikan ini merupakan faktor yang sangat mendukung untuk memecahkan permasalahan kesehatan, karena tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mendukung program kesehatan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan terbanyak ditamatkan penduduk Kota Bengkulu adalah tamat SLTA/MA sebesar 36,21% tetapi masih ada penduduk yang belum bisa membaca dan menulis (Buta Aksara). Kemampuan baca tulis tercermin angka melek huruf pada penduduk usia 10 tahun keatas.

Kota Bengkulu mempunyai potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, salah satunya adalah Pantai Panjang yang terletak di sisi barat Kota Bengkulu yang jaraknya dari pusat kota hanya lebih kurang 2 kilo meter. Letak yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota merupakan kekuatan yang dimiliki selain indahnnya panorama alam dan laut sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu untuk menjadikan Pantai Panjang sebagai kawasan wisata yang menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Bengkulu. Ada enam fokus bentuk wisata yang akan dikembangkan di kawasan Pantai Panjang yaitu: wisata pantai, wisata urban, wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan wisata pelabuhan. Pengembangan wisata kawasan pantai Kota Bengkulu ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bengkulu memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pariwisata. Hal ini dapat dilihat data dari Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu mengenai data kunjungan wisman dan wisnus tahun 2007-2014 yang menunjukkan ada kenaikan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya rerata sebesar 19,71 persen, yang akan memberikan peluang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bengkulu terhadap data jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Kota Bengkulu, Tahun 2007-2014

No	Tahun	M mancanegara	Nusantara	Total	Pertumbuhan (%)
1.	2007	301	109.747	110.048	-
2.	2008	326	214.452	214.778	95,17
3.	2009	430	210.321	210.751	-1,87
4.	2010	443	225.051	225.494	7,00
5.	2011	523	226.753	227.276	0,79
6.	2012	551	299.193	299.744	31,89

7.	2013	796	249.569	250.365	-16,47
8.	2014	895	303.186	304.081	21,46

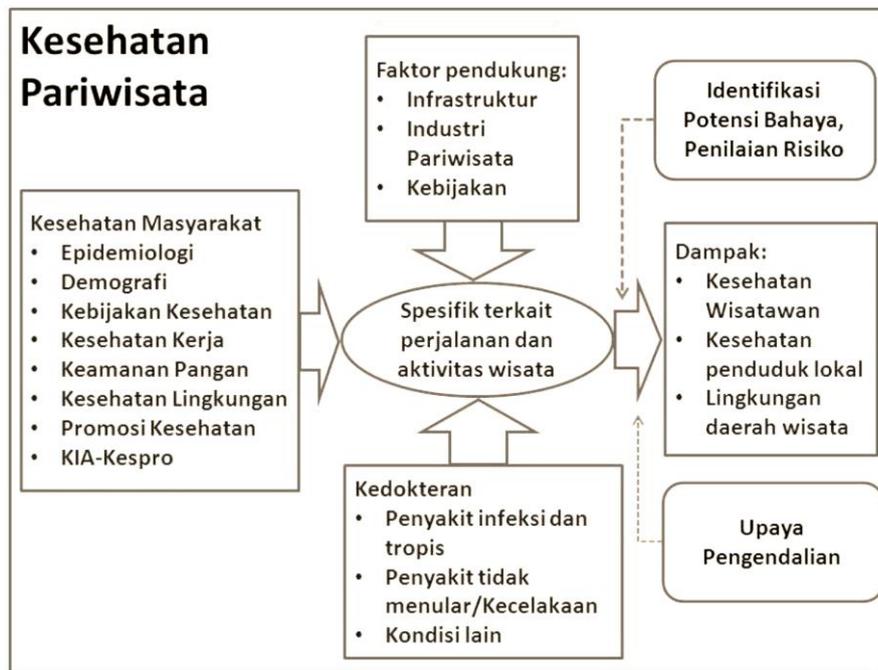
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu, 2015

B. Kesehatan Pariwisata

Dalam konsep yang lebih luas maka kita juga mulai mendengar istilah kesehatan pariwisata (*tourism health*) dan pariwisata sehat (*healthy tourism*). Namun demikian, sampai sejauh ini belum ditemukan definisi dan ruang lingkup untuk istilah-istilah tersebut di literatur ilmiah. Dengan memperhatikan berbagai definisi sebelumnya, maka kesehatan pariwisata dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan wisatawan, kesehatan masyarakat daerah pariwisata, maupun semua pihak yang terkait dengan industri pariwisata. Sedangkan pariwisata sehat adalah dampak yang diharapkan akibat penerapan upaya-upaya kesehatan pariwisata.

Tabel dibawah menunjukkan keterkaitan berbagai disiplin dan sub-disiplin yang sudah ada dalam kaitannya dengan identifikasi komponen-komponen utama dalam kesehatan pariwisata. Dari sini akan terlihat bahwa ruang lingkup kesehatan pariwisata menjadi sangat luas, mencakup kesehatan wisatawan, kesehatan masyarakat penjamu, kesehatan pekerja di industri pariwisata, kesehatan lingkungan daerah wisata, keamanan pangan daerah wisata, termasuk juga berbagai kebijakan terkait kesehatan dan pariwisata.

Tabel 3



Tabel 3 menunjukkan bahwa kesehatan pariwisata merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang unik dan spesifik terkait dengan perjalanan dan aktivitas wisata. Lebih jauh, sub-disiplin ini mencakup *health impact assessment* atau penilaian dampak terhadap kesehatan populasi dan lingkungan di daerah tujuan wisata. Aspek penting lainnya selain masalah kesehatan yang tidak terlihat disini adalah pertimbangan ekonomi. Pariwisata yang tidak sehat akan memberikan dampak terhadap industri pariwisata dan masyarakat penjamu. Sebaliknya, pariwisata yang sehat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk lebih mempromosikan pariwisata di daerah tersebut.

Untuk pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bengkulu, sangat dibutuhkan sebuah strategi untuk pengembangan wisata tersebut.

selain keindahan dalam wisata tersebut harus jugalah ada perhatian terhadap pembangunan posko kesehatan pada setiap tempat wisata yang ada. Hal itu merupakan masalah utama dalam pengembangan kawasan wisata yang ada di Kota Bengkulu, itu disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat dan para wisatawan, perencanaan yang belum terpadu antara pemerintah dan dinas kesehatan.

C. Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintahan Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2008. Pada tahun 2010 untuk pemilihan legeslatif telah terpilih 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 22 orang laki laki dan 8 orang perempuan.

Visi dan Misi Kota Bengkulu Visi dan Misi Kota Bengkulu seperti yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu tahun 2008–2013 adalah menuju masyarakat Kota Bengkulu yang bermartabat dan makmur. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki dua kunci pokok yakni masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kota Bengkulu mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci kedua adalah Kota yang makmur merupakan kondisi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan jasmani dan rohani. Kondisi Kota yang makmur akan tercapai melalui penguatan perekonomian rakyat dan bertumpu pada kekuatan lokal dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta dukungan sarana prasarana yang cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Pada dasarnya Pendirian Fasilitas Kesehatan Dalam Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepariwisata bisa dikatakan sudah hampir terlaksana dengan sempurna tapi masih ada kekurangan yang menghambat penyempurnaan Peraturan tersebut, diantaranya terdapat dalam BAB IV Usaha Pariwisata Pasal 7 Ayat (1) Huruf F yang mengatakan bahwa: usaha pariwisata itu harus meliputi Penyediaan Akomodasi yang terdiri dari:

- 1) Sarana dan prasarana olahraga
- 2) Pusat kesehatan
- 3) Perhotelan dan penginapan³⁷

Dalam Pasal itu yang menjadi perhatian bagi peneliti adalah pusat kesehatan. Seperti yang dilihat pada kenyataannya hingga saat ini pada tempat wisata hanya ada bangunan kuliner, pos jaga, perhotelan dan sarana prasarana olahraga. Padahal tidak ada bedanya dengan bangunan yang lain tersebut, sebuah pusat kesehatan haruslah juga ada dalam ranah pariwisata, karena itu merupakan salah satu pokok penting dalam wilayah wisata. Jika tidak ada pusat kesehatan pada satu tempat wisata maka jika ada sesuatu yang

³⁷ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah

terjadi kepada pengunjung maka akan susah memberikan pertolongan pertama untuk mencegah hal lebih buruk terjadi.

Meskipun demikian banyak alternatif yang telah dipikirkan oleh pihak-pihak pemerintahan yang bersangkutan, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Gusti Imansya selaku Kasih Hubungan Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif, S.Sos yang mengatakan:

“Daerah kawasan wisata di Kota Bengkulu memang tidak ada bangunan menjadi pusat kesehatan yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan daerah, akan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan serius dikarenakan sudah ada puskesmas terdekat yang menjadi pelarian jika ada musibah yang terjadi kepada para pengunjung wisata. Kalau daerah pantai panjang itu ada puskesmas Penurunan dan Lempuing karena itulah pusat kesehatan terdekat, tapi yang jelas pihak puskesmas dan kepariwisataan sudah melakukan kerjasama dalam hal menangani pengunjung yang mengalami musibah.”

Peraturan Daerah tentang Kepariwisata itu sebenarnya sangat berpengaruh dalam kegiatan wisata di Kota Bengkulu meskipun untuk menerapkannya haruslah ada turunan atau ketentuan yang diatur menurut peraturan Walikota, jadi sebelum menerapkan peraturan tersebut harus ada intruksi dari pemerintah kota. Itulah salah satu yang menghambat Implementasi peraturan pariwisata itu belum berjalan dengan maksimal. Jadi sangat perlu adanya kerjasama antara semua pihak yang bersangkutan.

Meskipun demikian, sudah dapat dikatakan secara tidak langsung pusat kesehatan pariwisata itu sudah ada walaupun belum dibentuk, seperti

yang dikatakan oleh Bapak Asmawir selaku Kepala Bidang Hukum di Kantor Walikota yang menjelaskan:

“Tidak masalah jika pihak dinas Kepariwisata memilih alternatif untuk bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam hal pusat kesehatan di pariwisata karena itu sah-sah saja selagi tidak ada pihak yang dirugikan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Menimbang karena banyak persiapan yang harus dilakukan untuk membuat posko kesehatan itu maka dengan cara kerjasama merupakan salah satu jalan terbaiklah untuk mengatasi permasalahan tersebut.”

Sama Halnya dengan yang dijelaskan oleh pihak pariwisata kota, Bapak Gusti Imansyah yang mengatakan:

“Kalau masalah pembuatan pusat kesehatan itu sebenarnya banyak hal yang menjadi permasalahan seperti, anggaran pembuatannya, perlengkapan kesehatan, orang yang siap berjaga pada pusat kesehatan tersebut dan masih banyak hal pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu tadi kami dari pihak pariwisata memilih alternatif seperti memanfaatkan puskesmas terdekat. Karena pada kenyataannya hal tersebut sama saja. Tapi jika sudah parah maka kami akan mengarahkan langsung ke Rumah Sakit.”

Ada juga penjelasan lain dari Bapak Gusti yang mengatakan:

“Meskipun tidak setiap hari ada musibah yang akan menimpa wisatawan yang berniat datang untuk berwisata, kami juga selalu melakukan monitoring baik ke puskesmas yang bekerjasama maupun ke tempat wisata yang ada di Kota Bengkulu.”

Dalam pembuatan atau kerjasama mengenai pusat kesehatan yang dimaksud, tidaklah ada aturan tertentu dalam kerjasamanya, seperti yang dikatakan Bapak Gusti selaku Kasih Hubungan Kelembagaan dan Ekonomi Kreatif, ia mengatakan:

“masalah monitoring sih hampir seminggu 2 kali kami melakukannya agar dapat melihat perkembangan yang dilakukan oleh pihak yang membantu. Selain itu kami juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang sedang berwisata

agar selalu menjaga kesehatannya dari rumah sendiri, agar tenang saat melakukan perjalanan wisatanya.”

Ada juga penjelasan lain yang diberikan oleh Bapak Gusti, mengenai pihak yang berkaitan di antaranya:

“dalam upaya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepariwisata Daerah, kami selalu memberikan yang terbaik dan selalu menyiapkan upaya-upaya lain jika semisal ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Meski kami sudah memilih cara bekerjasama dengan pihak puskesmas dalam menerapkan peraturan tersebut, kami tetap mengerahkan anggota di wilayah wisata untuk menciptakan dan menerapkan perlindungan kepada masyarakat.”

Ada juga hasil dari wawancara dengan pengunjung yang telah peneliti lakukan di antaranya. Hasil wawancara dengan saudara Serli, yang mengatakan:

“Saya sih tidak mengetahui adanya Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah dan saya baru ini tahu jika ada peraturan itu. Saya berkunjung ke wisata Pantai panjang ini sih jika ada waktu luang kalau tidak saat libur kerja. Memang benar jika tidak adanya pusat kesehatan pariwisata disini dan saya pun juga tidak pernah berfikir ke hal tersebut sih sebenarnya, Karena yang saya tahu itu hanya saya jalan-jalan saja.” Tidak lain halnya dengan yang disampaikan pengunjung dari luar

daerah yaitu Bapak Dasiman. Ia mengatakan:

“Oh kalau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 itu sih saya tahu karena saya juga pernah menjadi mahasiswa jurusan hukum di daerah saya, tapi saya pribadi sih baru sekali ini berkunjung ke Wisata Pantai Panjang ini dan saya tidak menyadari ketiadaan dalam pembangunan pusat kesehatan di pariwisata pantai panjang ini. Jika tidak saudara bertanya tadi, saya tidak akan sadar. Kalau menurut saya sih mungkin karena ada puskesmas terdekat ya jadinya tidak dibuatkan pusat kesehatan itu dan mungkin juga tidak ada biaya untuk melakukan pembangunannya.”

Ada juga pendapat yang disampaikan oleh Wawa selaku Pengunjung, yang mengatakan:

“untuk masalah Peraturan itu sih saya tidak terlalu tahu, tapi saya tahu bahwa pentingnya pembangunan pusat kesehatan pariwisata karena pada dasarnya pengunjung itu selalu merasa sehat-sehat saja, pasti ada masa dimana ada pengunjung yang mengalami musibah saat berwisata. Oleh karena itu pembangunan pusat kesehatan sangat dibutuhkan kalau menurut saya pribadi. Jugakan sudah ada peraturan yang menjelaskan kewajiban untuk membuat pusat kesehatan pariwisata jadi kalau bisa laksanakanlah dengan semestinya.”

Pengunjung dengan Nama Ibu Tri juga berpendapat:

“Kalau mau membangun Kepariwisata itu jangan setengah-setengah, tuntaskan apa saja yang ingin dibangun dan yang harus ada. Seperti pusat kesehatan pariwisata inikan sebenarnya sangat penting dan sama halnya dengan pos penjagaan jadi jika ada hambatan kenapa tidak adanya pusat kesehatan itu, ya permasalahan, atau ajukann untuk pendanaanya. Jangan misalnya dana pembangunannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan pembangunan itukan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Padahal dalam Peraturan Kepariwisata Daerah itu diwajibkan adanya Pusat Kesehatan. Tapi kenyataannya masih belum terlaksana.”

B. Faktor Penyebab Tidak Adanya Pusat Kesehatan Pariwisata

Dibidang kepariwisataan itu adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, selama sejauh ini di Kota Bengkulu sendiri sudah banyak destinasi pariwisata yang dibangun. Mulai dari Benteng Malborough, Pantai Berkas, Pantai Panjang, Danau Dendam dan tempat wisata lainnya. Sebanyak itu tempat pariwisata masih saja ada kekurangan dalam pembangunan. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepariwisata Daerah yang mana telah tertulis didalamnya seperti kewajiban adanya pusat kesehatan di pariwisata. Kenyataannya hal tersebut belum dijumpai sama sekali hingga saat ini, banyak alasan yang menjadi jawaban dalam

permasalahan ini. Seperti yang disampaikan oleh pihak kepariwisataan Kota dan Kepala Bidang Hukum di Kantor Walikota Kota Bengkulu.

Aturan wisata yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga tujuan dibuatnya destinasi pariwisata, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat.³⁸ pariwisata merupakan sebuah sistem yang besar karena memiliki suatu aktifitas yang kompleks. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti terdapat analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan.³⁹ Maka dari situlah dapat dikatakan bahwa pariwisata berdampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi pada suatu daerah.

bagian keamanan dan kesehatan dalam ranah pariwisata sangatlah penting, karena dua hal tersebut yang menjadi faktor penentu pada setiap tempat wisata. Pariwisata yang tidak sehat akan memberikan dampak terhadap industri pariwisata dan masyarakat penikmatnya. Sebaliknya, pariwisata yang sehat dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk lebih mempromosikan pariwisata di daerah tersebut untuk meaikan pembangunan dalam bidang perekonomian daerah tersebut.⁴⁰

Berikut merupakan beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait, diantaranya:

³⁸15M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA, 2013), h. 5-6.

³⁹ Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 29

⁴⁰ Adi Wirawan, "Kesehatan Pariwisata:Aspek Kesehatan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata". Vol. 03 NO. 01, h. 10

Penjelasan dari Bapak Asnawir selaku Kepala Bidang Hukum di Kantor Walikota Kota Bengkulu, yang mengatakan:

“Dalam setiap pembangunan yang ada di Bengkulu, pastinya sudah ada perencanaan yang dilakukan. Seperti apa saja yang ingin dibangun, ukuran yang sudah terhitung, lokasi yang akurat dan kelengkapan lainnya. Begitu pun di lokasi pariwisata, itu juga sudah ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh pihak terkait, jadi jika tidak tersedianya pusat pariwisata dalam lingkungan wisata maka itu pasti ada alasannya. Karena dalam pembangunannya itu membutuhkan izin, peralatan yang dibutuhkan bisa dibilang banyak, harus ada pihak yang ingin terlibat dalam hal itu dan anggaran yang paling utama. Dalam pembangunan pusat kesehatan di pariwisata setahu saya itu belum ada anggaran tertentu, jadi itu mungkin bisa menjadi alasan kenapa hingga saat ini belum terbangunnya pusat kesehatan pariwisata oleh pemerintah dinas pariwisata.”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Gusti, selaku Kasi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, ia mengatakan:

“memang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah itu ada kewajiban dibangunnya pusat kesehatan pariwisata. Namun pada kenyataannya masih belum terlaksana sepenuhnya itu disebabkan pihak kepariwisataan tidak memiliki anggaran untuk hal pembangunan itu. Maka dari itu sebabnya di setiap destinasi pariwisata tidak tersedianya pusat kesehatan.”

Adapula alasan lain yang menjadi jalan kedua kenapa tidak tersedianya pusat kesehatan, diantaranya kelanjutan yang disampaikan Bapak Gusti sebagai berikut:

“Meskipun dalam kepariwisataan tidak ada yang namanya pusat kesehatan, namun hal itu sudah kami antisipasi dengan cara bekerjasama kepada pihak puskesmas terdekat. Jadi jika ada musibah yang di alami pengunjung wisata maka akan langsung dibawa ke puskesmas tersebut, itulah alternatif kedua dalam penyingkapi hal ketiadaan pusat kesehatan pariwisata. Meskipun tidak ada anggaran, hal tersebut tidak membatasi kami dalam

melengkapi kekurangan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.”

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Asnawir:

“Meskipun anggaran untuk pembangunan pusat kesehatan pariwisata tidak tersedia, itu bukanlah sebuah hambatan besar. Sah-sah saja jika pihak kepariwisataan memilih alternatif berupa bekerjasama dengan pihak puskesmas terdekat. Asalkan tidak ada pihak yang dirugikan karena menimbang banyaknya kebutuhan dalam bidang pusat kesehatan itu. Saya sendiri juga akan melakukan hal yang sama untuk menciptakan kenyamanan dalam pariwisata di Kota Bengkulu. Meskipun demikian, pada hari-hari besar seharusnya tetap ada posko kesehatan di tempat wisata menimbang banyaknya pengunjung yang datang.”

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Gusti dari Pihak Kepariwisata, yang mengatakan:

“untuk hari-hari biasa ya seperti yang sudah disampaikan tadi itu cara menanggulangi kekurangan dalam pembangunan pariwisata yang salah satunya adalah pusat kesehatan. Tapi jika hari-hari besar seperti Lebaran, Tabot, Natal, Tahun Baru, itu pasti kami sediakan tenda sebagai posko kesehatan untuk pertolongan pertama.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengunjung wisata Pantai Panjang pada saat penelitian, yang mana mereka memiliki jawaban yang hampir sama dikarenakan melihat kenyataan yang ada pada lingkup pariwisata Pantai Panjang itu. Diantaranya:

Seperti yang disampaikan oleh Saudara Gita selaku Pengunjung, ia mengatakan:

“Saya kesini hampir setiap sore untuk melakukan aktifitas jogging dengan teman-teman, tapi kami memang tidak pernah melihat adanya pusat kesehatan di tempat pariwisata ini dan kami pun tidak pernah menanyakan hal tersebut.”

Ada juga penyampaian dari Bapak Sulaiman, yang mengatakan:

“Saya sih sama keluarga sekali-kali kesini untuk mengajak anak-anak mandi pantai, karena anak-anak saya itu suka sekali sama pantai. Kalau masalah ketiadaan pusat kesehatan di pariwisata saya juga sempat menanyakannya sama istri saya, tapi kami berdua orang awam yang tidak tahu soal itu. Untung saja selama saya kesini belum ada musibah yang kami alami dan semoga jangan sampai itu terjadi. Tapi saya ada lihat di dekat sini itu ada puskesmas jadi saya berfikiran kalau misal ada musibah yang dialami pengunjung bisa jadi langsung dilarikan ke puskesmas terdekat itu dan kami tidak memikirkannya lagi.”

Dari hasil wawancara yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan Pusat Kesehatan Pariwisata itu ada beberapa faktornya yang diantaranya: tidak ada anggaran untuk pembangunan dan banyak persiapan yang harus disediakan, serta belum adanya kerjasama antara dinas pariwisata dengan pihak kesehatan untuk pembangunan pusat kesehatan. Itulah sebabnya kenapa hingga saat ini pusat kesehatan di pariwisata tidak tersedia, meski begitu tidak menjadi penghalang bagi pihak dinas pariwisata untuk menciptakan tempat wisata yang aman.

Pariwisata di wilayah perkotaan (*urban tourism*) dikembangkan ketika di negara maju, khususnya di Eropa Barat, mulai terjadi proses de-industrialisasi. Pariwisata jenis ini difokuskan kepada konsep “*place marketing*” atau “menjual suatu tempat” dengan cara memberikan citra tertentu pada suatu wilayah geografis agar menarik perhatian kalangan bisnis dan wisatawan.⁴¹ dalam kaitannya dengan proses deindustrialisasi, nampaknya fenomena ini terjadi karena perkembangan industri di wilayah perkotaan telah menyebabkan kota menjadi wilayah geografis yang tidak

⁴¹ Selby, M. 2004. *Understanding Urban Tourism: Image, Culture and Experience*. (London and New York: I.B. Tauris & Co), h. 14.

nyaman untuk ditempati sebagai akibat tingkat polusi yang tinggi dan berbagai persoalan lainnya yang muncul.

wisatawan muncul karena mereka mempunyai motivasi, preferensi dan ekspektasi pada daya tarik wisata tertentu. Motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata biasanya disebabkan keinginan akan keluar dari rutinitas mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan dikelilinginya, disamping itu juga untuk mencari pengalaman baru, suasana baru dan menghilangkan kepenatan setelah sekian lama bekerja. Dari motivasi itulah wisatawan mencari tempat-tempat yang cocok sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya bisa memilih destinasi wisata alam, budaya, buatan atau minat khusus. Dari berbagai preferensi yang ada tersebut maka wisatawan akan mempunyai ekspektasi tertentu untuk memuaskan perjalanannya, ekspektasi dapat berupa pelayanan, fasilitas, dan tentu saja eksotisme dari destinasi wisata yang dituju.

Melihat pariwisata sebagai suatu sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Meski begitu Implementasi

Undang-Undang tentang Pariwisata masih saja belum terlaksana dengan baik karena beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas tadi.

C. Perkembangan Pariwisata

Dalam perkembangan pembangunan pariwisata hingga saat ini sudah terbilang mendekati sempurna karena banyak menarik wisatawan datang untuk berkunjung, tapi belum bisa dikatakan sempurna karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana yaitu berupa Pusat Kesehatan padahal dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pariwisata itu diharuskan adanya pusat kesehatan tapi kenyataannya belum ada. Pariwisata merupakan destinasi yang dikunjungi banyak orang saat ingin merasakan liburan dari aktifitas sehari-hari mereka. Seharusnya selain adanya pos penjagaan di destinasi pariwisata, harus juga ada pusat kesehatan agar lengkap rasa aman pengunjung.

Seperti penyampaian dari beberapa narasumber peneliti diantaranya:

Pendapat Ibu Tri, yang mengatakan:

“wisata pantai panjang ini sih sudah bisa dibilang cukup lengkaplah ya tapi belum sepenuhnya karena masih ada inti penting dalam destinasi wisata yang belum dibangun yaitu pusat kesehatan. Meski pihak pariwisata beralasan karena sudah bekerjasama dengan pihak puskesmas terdekat maka jika terjadi musibah, pengunjung yang cedera akan langsung di bawa ke puskesmas terdekat.”

Sama halnya dengan pendapat Saudara Tari, selaku pengunjung yang mengatakan:

“saya sangat bangga jadi warga Kota Bengkulu karena dapat merasakan keindahan wisatanya, meskipun masih ada kekurangan tapi saya tidak pernah menyadari hal tersebut, bagi saya itu sih sudah cukup baik. Bahkan sekarang ada pembangunan baru lagi di wisata pantai panjang itu, jadi bisa menambah meningkatkan daya tariknya.”

Untuk mengembangkan potensi pada kawasan wisata di Kota Bengkulu, sangat di perlukan strategi yang tersusun agar bertambahnya wisatawan yang menikmatinya.⁴² Selain memperhatikan potensi wisatanya, haruslah ada perhatian terhadap pembuatan posko kesehatan di setiap kawasan wisata yang ada di Kota Bengkulu untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang datang. Sektor Pariwisata adalah salah satu pembangunan yang mempunyai manfaat ganda atau *multiplier effects* secara ekonomi bagi pemerintah daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan⁴³.

Dalam memperkenalkan dan menggalakkan wisata, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti promosi wisata, pembangunan sarana dan prasarana menuju tempat wisata, dan penyediaan akomodasi yang memadai berupa hotel dan akomodasi lainnya. Seiring dengan upaya yang

⁴² Budiman Sakti, Handika Fikri P, “*Trategi Pengembangan Pantai Panjang Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Wisatawan dan Masyarakat Lokal*”, Vol 01 No. 1, h. 3

⁴³Barika,”Kajian Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Bengkulu (studi kasus penegmbangan kawasan wisata pantai panjang dan tapak padri)”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor,2009), h.1

telah dilakukan oleh pemerintah daerah, masih terdapat beberapa kendala terkait pengembangan sektor pariwisata di provinsi Bengkulu.⁴⁴ Salah satu kekurangannya seperti ketiadaan pusat Pariwisata di Kota Bengkulu. Padahal adanya posko pelayanan kesehatan sangat la diperlukan dipusat pariwisata yang bersifat umum dan banyak di datangi orang, guna memberikan pelayanan pertama jika terjadinya hal yang tidak baik seperti kecelakaan atau sakit mendadak ketika berada di tempat pariwisata.⁴⁵

Pendapat Bapak Gusti dari pihak Dinas Pariwisata mengatakan:

“Setiap Pembangunan di pariwisata Kota Bengkulu itu sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum di bangun, dan jika seandainya ada pendanaan untuk pembangunan pusat kesehatan pasti akan segera kami buat dan tidak akan bekerjasama lagi dengan puskesmas, tapi sampai saat ini anggaran tersebut belum tersedia dari pemerintahan bahkan kabarnya saja belum ada. Jadi kami hanya terfokus pada pembangunan yang lainnya saja dulu untuk saat ini.”

Begitu juga yang disampaikan Bapak Asnawir dari kantor Walikota Kota Bengkulu, yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan wisata Kota Bengkulu memang sudah ditata sedemikian rupa, maka dari itu sudah banyak pembangunan untuk meningkatkan daya tarik Kota Bengkulu itu sendiri. Kalau sepengetahuan kami memang tidak ada anggaran untuk pembangunan Pusat Kesehatan di Pariwisata. Sampai saat ini pun belum ada pengajuan untuk membangun pusat kesehatan melainkan untuk pembangunan lainnya di pariwisata.”

⁴⁴Suwarni, Ahmad Soleh, “Membangun Bengkulu Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata”, *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, Tahun 2014, h.826.

⁴⁵Suwarni, Ahmad Soleh, “Membangun Bengkulu Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata”, *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, Tahun 2014, h.826.

Di samping itu sektor pariwisata juga mampu menjalankan fungsinya sebagai katup pengaman di saat krisis sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) yang cukup besar pada sektor-sektor lain. Pada masa sekarang ini terjadi perubahan yang cukup signifikan berpengaruh pada dunia kepariwisataan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, sebagai akibat dari dinamika global, pasar wisata, perwilayahan, lingkungan, regulasi dan perubahan paradigma. Sebagai akibat dari perubahan paradigma dan lingkungan di samping membawa “cerita manis” tersebut, ternyata pariwisata menimbulkan permasalahan yang bersifat multi dimensi dan kompleks, namun demikian pembangunan kepariwisataan tetap penting untuk dilakukan dalam mendukung pembangunan nasional.

Penjelasan dari pengunjung di kawasan wisata Pantai Panjang seperti yang dikatakan oleh saudara Putri:

“Saya berpendapat bahwa perkembangan kepariwisataan Pantai Panjang sampai saat ini sudah cukup berkembang sih, meskipun masih ada kekurangan yang disini ketidakadaan pusat kesehatan tapi tidak terlihat oleh tersusun rapinya sarana dan prasarana lain di lingkungan pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Kalau saya pribadi sih tidak masalah dengan ketiadaan pusat kesehatan di pariwisata jangan saja waktu hari besar posko itu tidak ada karena pada saat seperti itulah sangat diperlukan kehadiran posko kesehatan dalam lingkungan pariwisata.”

Sama halnya dengan yang disampaikan saudara Rafis, yang berpendapat:

“Wisata yang ada di Kota Bengkulu ini menurut saya pribadi sih sudah cukup bagus dan tertata rapilah, meskipun mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam pembangunan yang belum terlaksana. Seperti salah satunya tidak ada pusat kesehatan yang saudara tanya tadi, tapi menurut saya itu tidak terlalu dipermasalahkan sih soalnya setiap pengunjung pada hari biasa

pasti ada persiapan sebelum pergi dan tidak terlalu banyak pula pengunjung yang menyebabkan desak-desakan yang memungkinkan untuk kecelakaan itu terjadi.”

Ada juga pendapat dari Bapak Asnawir, mengatakan:

“Tidak semua isi dalam Peraturan Daerah itu bisa terlaksana semua karena pada dasarnya pasti ada hambatan yang terjadi meskipun tidak diharapkan. Maka dari itu harus ada rencana cadangan untuk mengantisipasi atas kekurangan belum terlaksana semuanya isi dari peraturan yang tertulis. Tinggal bagaimana cara pihak yang bersangkutan mengatasi hal tersebut.”

Begitu juga penjelasan dari Bapak Gusti, yang mengatakan:

“Saat ini sudah sekitar 80% pembangunan dalam lingkungan pariwisata terlaksana, tapi jika mengenai pembangunan pusat kesehatan di pariwisata memang tidak ada pembangunannya. Karena pada dasarnya banyak hal yang harus di persiapkan dalam melaksanakan pembangunan itu dan harus ada anggaran dana yang di tujukan untuk pembangunan itu. Tapi pada kenyataannya tidak ada sedikit pun anggaran dana untuk pembangunan pusat kesehatan pariwisata jadi untuk menanggulangnya ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu dengan cara kerjasama dengan puskesmas terdekat.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, pusat kesehatan di pariwisata itu memang penting adanya, tapi jika dari pusat tidak menggarakan untuk hal itu maka tidak ada pembangunan yang dilakukan dalam hal tersebut. Meskipun demikian pembangunan sarana dan prasarana yang lain pada lingkungan pariwisata tetap dijalankan membebaskan kekurangan yang ada, tapi hal tersebut menjadi pendorong bagi dinas pariwisata dalam membuat solusi bagaimana caranya agar pengunjung tetap merasakan aman dan nyaman saat berwisata yaitu dengan cara memanfaatkan puskesmas terdekat untuk bekerja sama.

Kerjasama itu tidak menjadi suatu larangan bagi pihak pemerintahan kota, selagi tidak menyimpang dan dapat mengatasi

permasalahan yang terjadi. Akan tetapi semua itu jangan lari dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah. Aturan wisata yang bijaksana terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga tujuan dibuatnya destinasi pariwisata, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat.⁴⁶ pariwisata merupakan sebuah sistem yang besar karena memiliki suatu aktifitas yang kompleks. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti terdapat analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan.⁴⁷ Maka dari situlah dapat dikatakan bahwa pariwisata berdampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi pada suatu daerah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mamat salah satu pedagang yang menjual bakso bakar daerah pantai panjang, ia mengatakan:

“selama saya berjualan di pantai panjang ini belum pernah saya melihat ada pembangunan pusat kesehatan daerah sini dan saya juga tidak pernah mempertanyakan hal itu. Karena jarang sih saya melihat ada musibah yang terjadi di daerah pantai ini dan jika pun ada, saya juga tidak pernah tau korbannya di bawa kemana kecuali kecelakaan berat pasti langsung di bawa ke rumah sakit terdekat. Jadi menurut saya sih tidak perlu terlalu di permasalahan jika tidak adanya pusat kesehatan di daerah sini. Tapi kecuali dengan hari besar, itu hampir disemua tempat ada pos-pos kesehatan dan pos penjagaan, lengkaplah pokoknya.”

Untuk mengembangkan potensi pada kawasan wisata di Kota Bengkulu, sangat di perlukan strategi yang tersusun agar bertambahnya

⁴⁶15M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA, 2013), h. 5-6.

⁴⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 29

wisatawan yang menikmatinya.⁴⁸ Selain memperhatikan potensi wisatanya, haruslah ada perhatian terhadap pembuatan posko kesehatan di setiap kawasan wisata yang ada di Kota Bengkulu untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi wisatawan yang datang.

⁴⁸ Budiman Sakti, Handika Fikri P, “*Trategi Pengembangan Pantai Panjang Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Wisatawan dan Masyarakat Lokal*”, Vol 01 No. 1, h. 3

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pendirian fasilitas kesehatan dalam pariwisata cukup memiliki berdampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi pada suatu daerah karena tidak semua wisatawan yang berkunjung ke sana akan selalu sehat-sehat saja, kadang ada juga kemungkinan sakit dan kecelakaan yang akan terjadi. Maka dari itu haruslah ada perhatian pada setiap hal-hal yang ada dalam kepariwisataan tersebut, yang utamanya adalah keamanan dan kesehatan. Pada dasarnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita saat bergerombol menikmati destinasi wisata yang dikunjungi. Oleh sebab itu Pemerintah Harus dapat mengantisipasi seperti menyediakan keamanan wisata dan posko kesehatan agar tidak ada hal buruk yang terjadi.

B. SARAN

Kepada masyarakat jika ingin berwisata haruslah ada persiapan diri dan semua perlengkapan yang dibutuhkan sebelum berpergian ke destinasi wisata yang dituju, agar dapat menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi saat berwisata. Begitu pula kepada aparat pemerintah yang terkait agar lebih memperhatikan kekurangan yang terdapat pada tempat wisata di Kota Bengkulu seperti yang telah dituliskan dalam per-Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah agar Implementasi peraturan tersebut dapat terlaksana dengan sempurna. Kepada akademisi agar

melanjutkan penelitian selanjutnya karena menurut penulis masih banyak masalah yang belum dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Depok, Sleman,
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar grafika. 2011.
- Al-Raghib al-Alashfihani, *Mu'jam al-Quran Li Alfaz al-Quran*, (Dar Fikr, Beirut, 1989 M),
- Barika, "Kajian Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Bengkulu (studi kasus pengembangan kawasan wisata pantai panjang dan tapak padri)", *Tesis*, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harsoyo, *Managemen Kerja*, (Jakarta: Persada, 1977)
- Imam Bukhari dalam *Sahehnya bab Fadhlul Shalah fi Masjid Makkah wa Madinah*, jilid 4, h. 491, h. 1189 dan Imam Muslim dalam *Sahehnya bab La Tasyuddu al-Rihal Illa fi Tsalatsa*, Jilid 4, h. 126
- Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahris Li-Alfaz al-Quran*, (Maktabah Islamiyah, Istanbul, Turki, 1984 M)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Selby, M. 2004. *Understanding Urban Tourism: Image, Culture and Experience*. (London and New York: I.B. Tauris & Co)
- Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (IslamQA, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rdan D Bandung* : Alfabeta, CV, 2013.
- Suwarni, Ahmad Soleh, "Membangun Bengkulu Melalui Peningkatan Sektor Pariwisata", *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, Tahun 2014.
- Suwena, Ketut, Gusti Ngurah, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017)

Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

Unggul Priyadi, *Pariwisata Daerah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

Wibowo budi, Agus, Muzakir Ismail, *Dunia Periwisata di Aceh*, Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan provinsi NAD, 2008.

Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Daerah

B. Jurnal dan Skripsi

Adi Wirawan, “*Kesehatan Pariwisata:Aspek Kesehatan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata*”. Vol. 03 NO. 01

Al Hasan Amin Fahadi, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2, No 1, jurnanal Ilmu Syariah dan Hukum, Juni, 2017.

Bagiastuti, Ketut, “*Implementasi Undang-Undang Kepariwisataan dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali*”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2

Bahrudin, Agus, ”Inovasi Sektor Pariwisata Daerah”, *Jurnal Primadany*, Vol. 1, No 1, *Jurnal Mimbar Administrasi*, Oktober, 2017.

Barika, ”Kajian Dampak Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Bengkulu (studi kasus pengembangan kawasan wisata pantai panjang dan tapak padri)”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009)

Hariyani Yuni, Melda “Strategi Pengembangan Jasa Pariwisata Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Universitas Bengkulu: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, 2007.

Kosasih, Ade, ”Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-garis Besar Haluan Negara”, *Jurnal Mizani*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Maharani, Prasetya, Deddy, “Pengembangan Potensi Pariwisata”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3, No. 3, Agustus, 2014.

- Pareke, Jt, “Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Dalam Konsep Tiga Kesatuan Perlindungan Berkelanjutan “*Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1,2017.
- Permatasari, Intan, “Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata”, *Jurnal Madania*, Vol. 2, No. 1, 2016
- Permatasari, Intan, “Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata ”, *Madania*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017
- Primadany, Ryalita, Sefira, “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Desa Nganjuk)”,*Jurnal Primadany*, Vol. 1, No. 4,2017.
- Sakti Budiman, Handika Fikri, *Strategi Pengembara Pantai Panjang Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Wisatawan dan Masyarakat Lokal*”, Vol. 1 No. 1.
- Zarina, “Penataan Kawasan Wisata Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islami (Studi Deskriptif Analitis Tempat Wisata Pantai Kuthang Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)”, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh: *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2018.